A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA KEWARGANEGARAAN KANDIDAT

B. NAMA PENULIS

NAMA : AKHYAR AMAR AWALUDDIN

NIM : 10200120164

HUKUM TATA NEGARA

C. ABSTRACT

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil dari pemilu pada kewarganegaraan oleh hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berada pada Mahkamah Agung. kemudian mengalihkan latar belakang tentang kewenangan mengadili perselisihan hasil tersebut dari pemilihan. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Daerah dari Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum hal ini berlanjut perlu diketahui menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa objek sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bersifat kuantitatif hanya berdasarkan hasil penghitungan suara, akan tetapi juga bersifat kualitatif, yaitu melanggar aturan prinsip pemilihan umum dengan karakter suka maju, umum, bebas, rahasia, lalu jujur dan adil itulah yang mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan hukum pemilu yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili sengketa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur tentang pidana acara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam surat ini menunjukkan bahwa keputusan secara masif dan sistematis selain perselisihan dari hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pertimbangan hukum untuk mencukupi rasa keadilan masyarakat secara progresif disebabkan dari aspek pembusukan kuantitatif setelah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipilih berdasarkan suara rekapitulasi dan perhitungan dimana kuantitatifnya adil yang telah dinilai melanggar benturan dalam keadilan prosedural dan substantif baik sebagai siniquanom. Seharusnya upaya untuk mengarahkan keseluruhan aspek demokrasi dari bagian dan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menjadi hal utama untuk menentukan dan menetapkan hasil rekapitulasi dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam bentuk surat rekomendasi, diperlukan produk regulasi sendiri untuk mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah selama ini, hingga penegasan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pemilihan umum. Dengan melakukan regulasi sendiri, maka mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan lebih jelas, terutama untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan dari hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, dalam kewenangan konstitusi hal ini bertujuan menuntaskan permasalahan pada kewenangan mahkamah konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilu pada kewarganegaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah sendiri.

D. PENDAHULUAN

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ke dalam tiga kurun waktu yakni demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila (1997-sekarang) dengan memiliki tiga naskah konstitusi negara yaitu UUD Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum dengan tiga jenis pemilihan umum yakni pertama Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di atur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, kecuali Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masih mengikut di Undang Undang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), yang mengandung pemaknaan bahwa perwujudan Indonesia menuju sebuah negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Implementasi negara hukum melalui kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dengan menitikberatkan pada pembagian kekuasaan secara materil dengan menganut sistem kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai salah satu kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di Indonesia menjadi salah satu substansi penting perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi mengadili perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2), serta diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut berarti bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Prinsip tersebut adalah merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi secara konstitusional berwenang dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berwenang mengadili pada tingkat pertama dan undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, selanjutnya dalam ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketiga memutus pembubaran partai politik, dan keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dalam ayat (2) disebutkan bahwa; Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar manusia, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, karena itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menentukan hukum (*rechtvinding*) dan bahkan membentuk hukum baru (*rechtforming*) wajib mengawal asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1), bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konsteks pengawalan penyelenggaraan pemilihan umum Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penyangga upaya hukum terakhir bagi para peserta pemilihan umum yang merasa dirugikan hak-haknya dalam penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk semua rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya melalui distribusi pemberian hak suara pada masing-masing tempat pemungutan suara. Peserta pemilihan umum maupun rakyat pemilih mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, ketika dirugikan hak dasarnya berdemokrasi dan berpolitik melalui Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendapatkan keadilan (*justisiabelen*). Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1) yakni memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga yang berhak memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi, termasuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dasar Peralihan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi di asumsikan bahwa kekuasaan Yudisial berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Bab IX mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di samping kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah diatur adanya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang saat ini dapat dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan umum berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

E. METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini ialah:

1. Agar dapat mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilu pada Kewarganegaraan Kandidat
2. Memahami metode yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan hasil pemilu

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap sudah hal mutlak. Adapula strategi yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan keseluruhan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan Pencatatan, penatapan, menyelaraskan dan harmonisasi, setelah itu dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni mencatat dan merekam dalam bentuk catatan berupa kartu, catalog dan sistem brosing internet. Setelah bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan tujuan untuk dapat merumuskan dan menjelaskan serta menemukan jawabannya. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistimatis sehingga bermakna yuridis dan dapat dipertanggung jawabkan atas obyek yang dijadikan penelitian.

F. PEMBAHASAN

Hakikat demokrasi mensyaratkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dukungan dan partisipasi rakyat yang berdaulat, merupakan prasyarat demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, demos dan kratein. Demos bermakna rakyat, atau rakyat banyak, kratein bermakna pemerintahan. Demokrasi bermakna pemerintahan rakyat (government of the peoples). Sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi beberapa unsur, yaitu pertama ada kebebasan guna membentuk dan menjadi anggota komunitas atau perkumpulan, kedua, ada kebebasan menyatakan pendapat, ketiga ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, keempat, ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara, kelima, ada hak bagi para warga aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara, keenam, pemilihan yang bebas dan jujur, ketujuh, terdapat berbagai sumber informasi, kedelapan, ada lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah yang secara konstitusional bergantung kepada keinginan rakyat. Secara Mahkamah Konstitusi sebagai penegak dan pengawal konstitusi, maka dari delapan unsur, menjadi penting guna mendapatkan perhatian dalam kaitan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan negara

hukum Indonesia yang demokratis. Pada hakikatnya kedaulatan dalam Negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal yang dimaksud membuktikan, bahwa kedaulatan konstitusional yang nyata dijalankan oleh rakyat pada saat diselenggarakannya agenda konstitusi, termasuk pemilihan umum secara langsung. Jadi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam representative democracy, direalisasi melalui pemilihan umum, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR, DPD, DPRD, termasuk Pemilukada. H.Abdul Latif berpendapat bahwa³ Hal ini menurut konstitusi lewat pemilihan umum rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya. Itulah sebabnya, penyimpangan terhadap Pemilihan Umum termasuk Pemilukada, baik yang berkenaan dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai proses demokratisasi yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Rakyat berkedudukan sakral dalam suatu negara, namun rakyat pemegang kedaulatan sendiri terikat, dan dibatasi oleh Undang Undang Dasar. Menurut H.M.Laica Marzuki bahwa⁴ Rakyat tidak boleh menjalankan kedaulatannya secara inkonstitusional. Kedaulatan tidak boleh dilakukan berdasarkan the ruling of the mob tetapi atas dasar konstitusi, disinilah het wezen dari konstitusionalisme. Konstitualisme pada hakikatnya membatasi kekuasaan. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Dalam menunjang kelanjutan demokrasi apalagi dalam pelaksanaan hasil pemilihan umum, termasuk Pemilukada fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sudah tepat, karena keberadaan Mahkamah Konstitusi menurut H. Mukhtie Fadjar bahwa Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional, sejalan dengan argumentasi bahwa fondasi sebuah demokrasi yang berkelanjutan (a sustainable democracy) tidak lain dari wujud negara konstitusional (constitutional state) yang bersandar kepada konstitusi yang kokoh, yang dapat melindungi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan dari semua ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh harus mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan, artinya hanya konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), yang dapat memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan secara konstitusional dalam menangani perselisihan pemilihan umum, termasuk Pemilukada yakni kewenangan yang diberikan atas dasar konstitusi, yakin berdasarkan constitutionele bevoegheden dalam arti UUD atau Grundgesetz. Constitutionele bevoegheden dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pada pasal 24C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Menurut Stroink dan Steenbeek berpendapat bahwa⁶ Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangannya, dan lembaga negara konstitusional lainnya. Penjaminan hak- hak dasar warga negara termasuk hak politik adalah wujud berkelanjutan dari demokrasi. Hasil akhir dari mutu pemilihan demokratis adalah proses akhir dari sebuah pesta demokrasi, yakni pemilihan umum, termasuk Pemilukada. Ketika proses akhir itu diwarnai, ketidakadilan, kecurangan, maka komunitas demokrasi dapat rusak tatanannya, yang pada akhirnya asas demokrasi dan pemilihan umum atau Pemilukada dapat pula rusak adanya. Arti Kewenangan Kewenangan atau wewenang dengan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Menurut Phillipus M. Hadjon istilah berpebdapat bahwa Kewenangan disejajarkan dengan authority dalam bahasa Inggris dan bevoegdheid dalam bahasa belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command

their orders lawfully issued in scope of their public duties. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dan lingkup melaksanakan kewajiban publik. “Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda. Philipus M. Hadjon lebih lanjut memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan bevoegdheid bahwa⁸ Istilah “bevoegdheid” di gunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu Mahkamah Konstitusi merupakan badan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki Checks and Balances Konstitusional. Kewenangan dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi. Bermula dari kewenangan mengadili hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berada pada Mahkamah Agung. Hal ini dimaksud tidak terlepas dari perkembangan konotasi dan makna konstitusional dari pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 18 ayat 4 UUD NKRI Tahun 1945 diberlakukan pada Perubahan Kedua UUD NKRI Tahun 1945, dalam Rapat Paripurna MPR pada tanggal 18 agustus 2000. Makna dan tafsir kata “... dipilih secara demokratis...”, dalam pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 tersebut mengalami perubahan makna secara konstitusional, sejalan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kala sejak diberlakukannya pasal konstitusi dimaksud, yang mengalami perkembangan perubahan sistem dan cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari waktu ke Waktu. Ketika diberlakukan pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Pada tahun 2000 Perubahan kedua UUD NKRI Tahun 1945, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 kata “... dipilih secara demokratis...” pada pasal 18 ayat (4) UUD NKRI tahun 1945 saat itu dilakukan atas dasar pemilihan tidak langsung. Berlakunya UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sistem pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat banyak, bukan lagi dipilih DPRD secara konstitusional, dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung dimaksud, telah dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tergolong rezim pemilihan umum.

G. KESIMPULAN

Pada Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali di revisi, baik karena ada hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut ataupun karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada awalnya diselesaikan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang akhirnya melimpahkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari rezim Pemilu dan adanya pertikaian yang berlarut akibat putusan sengketa hasil pilkada yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya hal mengenai pengalihan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara jelas tentang tenggat waktu pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya pada tanggal 29 Oktober ditandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara teknis tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Adanya upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali pasca putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan peradilan Mahkamah Agung menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap hukum. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (3) Memutus pembubaran partai politik dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

DAFTAR PUSAKA

www.mahkamahkonstitusi.go.id/Sinopsis/sinopsis_57phpud2008.pdf
<http://patrius.blogspot.com/2009/10/kajian-putusan-mahkamah-konstitusi>.
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/119308-T%2025202-Proses%20penyelesaian-Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf>
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/242>